



Pendidikan Literasi dan Edukasi Politik untuk Masyarakat Keboansikep Sidoarjo dalam PILKADA Sidoarjo 2020

Suyono ¹, Suhartono ²

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Alamat: Jl. Dukuh Menanggal XII, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya,
Jawa Timur 60234; Telepon: (031) 8281181

Email. Suyono@unipasby.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the state of political literacy of the Keboansikep community, as well as to understand the role of the KPU in the context of the state of political literacy. This study uses a qualitative-descriptive approach, to reveal phenomena related to political literacy based on the results of research documents conducted by the Sidoarjo Regency KPU, as well as information from informants from the KPU of East Java Province. The results of the study conclude that the state of political literacy in the Keboansikep community is still very limited only to literacy related to the electoral process and does not reflect education that is oriented towards strengthening the system of understanding and actualizing the rights and obligations of citizens. The new political education is carried out by the KPU through socialization activities, technical guidance (technical guidance) and voter education which it will carry out in the context of the agenda for the stages of the election that will be held as election organizers. The state does not yet have an educational program to improve systemic and sustainable political literacy. The disappointment of the voting community towards the attitude and performance of the leaders and representatives of the people from the general election results in an anomalous phenomenon where the public is known to have knowledge and understanding of politics but it is not consistent with their attitudes and behavior. In political education, the KPU plays a role in conveying information about the election events it holds and providing political education to the public which is only limited to the electoral context for the sake of increasing the percentage of voters turned out and decreasing the percentage of invalid votes.*

Keywords: *political literacy, political knowledge, community understanding, Keboansikep Village*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan literasi politik masyarakat Keboansikep, serta untuk memahami peran KPU dalam konteks keadaan literasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, untuk mengungkap fenomena berkenaan dengan literasi politik berdasarkan dokumen hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, serta keterangan informan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keadaan literasi politik di Masyarakat Keboansikep masih sangat terbatas hanya pada literasi yang berkaitan dengan proses pemilihan saja dan belum mencerminkan edukasi yang berorientasi pada penguatan sistem pemahaman dan aktualisasi hak dan kewajiban warga negara. Edukasi politik baru dilakukan oleh KPU melalui kegiatan sosialisasi, bintek (Bimbingan Teknis) dan pendidikan pemilih yang dilaksanakannya dalam rangka agenda tahapan pemilu yang akan digelarnya selaku penyelenggara pemilu. Negara belum memiliki program edukasi untuk peningkatan literasi politik yang sistemik dan berkelanjutan. Kekecewaan masyarakat pemilih terhadap sikap dan kinerja pemimpin dan wakil rakyat hasil pemilihan umum menimbulkan fenomena anomali dimana masyarakat diketahui memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik namun hal itu tidak konsisten dengan sikap dan perilakunya. Dalam edukasi politik KPU berperan dalam menyampaikan informasi tentang event pemilu yang diselenggarakannya dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang hanya terbatas pada konteks pemilihan saja untuk kepentingan peningkatan presentase suara sah dan penurunan presentase suara tidak sah.

Kata Kunci: literasi politik, pengetahuan politik, pemahaman masyarakat, Desa Keboansikep

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 24, 2023

* Suyono, Suyono@unipasby.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilihan umum, Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota (Pilkada), Pilkada ialah aktivitas yang lama serta memerlukan perhatian khusus sebab pada tahun ini dilakukan pada dikala pandemi, seluruh petugas yang ikut serta dari tingkatan nasional hingga desa wajib mempersiapkan diri, melindungi serta meningkatkan kesehatan supaya bisa melaksanakan tugas dengan mudah (Kementrian Kesehatan, 2020: 02). Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota sejak Indonesia merdeka sebelum tahun 2005 hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada Bulan Juni 2005.

Begitu juga yang terjadi dalam PILKADA Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dilakukan secara demokratis dengan menggelar pemilihan langsung untuk memilih calon Bupati dan wakil Bupati. Menurut data Panwas Pilkada Sidoarjo mencatat DPT Pilkada Sidoarjo 2020 sebanyak 1.404.887 pemilih yang merupakan hak suara yang harus mampu diaspirasikan untuk memilih calon-calon pemimpin di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan suatu Pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Masyarakat menjadi bagian terpenting dari pesta demokrasi tersebut, karena partisipasinya/perannya untuk hadir dan melaksanakan pemilihan merupakan modal keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat dibutuhkan sejak tahapan pemilu dari penyeleksian DPS (Daftar Pemilih Sementara), tahapan kampanye, tahapan pemilihan serta pemantauan terhadap proses perhitungan suara. Dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, peran serta tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal sangat penting peranannya, terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh maupun menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat. Umumnya tokoh masyarakat menjadi panutan dalam segala kegiatan sehari-hari.

Ramaputra (Ramaputra & Afifi, 2021) mengungkapkan satrategi promosi usaha foodies Brosis PKU dimulai dari proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Proses perencanaan terdiri dari creative brief, pengembangan ide kreatif dan pemilihan platform Media Sosial. Strategi kreatif konten promosi yang diimplementasikan adalah pengembangan konten endorsement dan enter-tainment, edukasi publik dengan konten budaya lokal dan mengembangkan konten human interest. Berbeda dengan penelitian yang sedang saya teliti di Desa Keboan Sikap, tidak ditemukan ini

Penelitian Rafni (Rafni & Suryanef, 2017) memaparkan peran relawan demokrasi selaku fasilitator Pendidikan Politik atau Pendidikan pemilih berbasis komunitas pada pemilu tahun 2014 kemudian, literasi politik tidak semata terpaut dengan pengetahuan politik, namun pula metode membuat seorang berperan efisien dalam kehidupan politik, dalam riset tersebut belum diungkapkan pengetahuan warga tentang berartinya pemahaman politik

Penelitian Astuti (Astuti, 2019) mengungkapkan Melalui kombinasi aktivitas kreatif dalam lokakarya yang dirancang buat memenuhi tujuan tersebut, literasi politik siswa sekolah menengah atas sebagai pemilih pemula yang berpartisipasi dalam proyek ini dibentuk dan ditingkatkan. Di akhir lokakarya, cukup disimpulkan bahwa penerapan pendekatan kewargaan aktif untuk model tersebut telah bekerja dengan baik dalam membawa perhatian siswa terhadap isu- isu politik, khususnya yang lokal, dan memotivasi mereka buat memberikan suara mereka dalam pemilihan kepala daerah yang hendak tiba. Pengalaman langsung dalam menangani isu- isu politik serta keterlibatan keluarga terbukti menjadi kunci dalam memaksimalkan model untuk mengaktifkan pemikiran kritis, menjaga pemahaman politik mereka, dan pada gilirannya mendorong partisipasi politik mereka .

Strategi pembangunan pemahaman politik lewat Pembelajaran perdamaian dicoba dengan menitikberatkan pada sebagian perihal ialah 1) wujud aktivitas disesuaikan dengan usia dan latar balik sosial, 2) materinya meliputi data wawasan kebangsaan, hoaks serta tolerensi serta 3) aktivitas dievaluasi secara berkala serta partisipan program dilibatkan buat revisi berkepanjangan. Nyaris seluruh program yang disesuaikan dengan ciri serta kebutuhan warga sanggup menolong membangun pemahaman politik dibidang pemberantasan hoak. Tetapi upaya pengembangan warga yang dicoba oleh pemerintah pula baru sdiperhatikan dengan baik. Dalam penelitin ini tidak diungkapkan pengetahuan pemahaman warga pemahami melek politik. (Ayu Mawarti et al., 2022)

Penelitian Ibeawuchi et.al. (Ibeawuchi et al., 2022) menganjurkan pengembangan dan pelembagaan Pendidikan literasi politik di Nigeria Melalui naungan universitas dan perguruan tinggi Pendidikan Nigeria, sebagai Lembaga dasar Untuk menerapkan perangkat instruksi kurikulum yang inovatif dan pengembangan kualitas Guru yang kompeten untuk mendorong perkembangan politik negeri. Nigeria. Pada prinsipnya, esensi Pendidikan literasi politik diartikulasikan sebagai fortifikasi pengembangan tata pemerintahan yang demokratis, penanaman nilai-nilai untuk menetralsisir kekerasan politik, perluasan ruang lingkup politik, promosi Pendidikan politik internasional, termasuk pelembagaan System pemilu yang kredibel, interkonektivitas politik ke nasional, perdamaian dan pembangunan global. Strategi untuk penyebarluasan Pendidikan literasi politik yang efektif digambarkan selaku: pengembangan kursus Pendidikan literasi politik, pengembangan professional pendidik ilmu politik penggunaan teknologi komunikasi data, penggunaan Bahasa pribumi secara ekstensif, lainnya adalah kepekaan media aktif, dukungan politik, organisasi lokakarya, konferensi dan seminar.

Rachman (Rachman et al., 2022) mengungkapkan kajian Pustaka yang membahas masalah peningkatan literasi politik sebagai salah satu prasyarat penting untuk menghasilkan pemilu berkualitas dengan partisipasi berkualitas dalam rangka agenda besar pemantapan dan pengembangan kehidupan demokrasi, khususnya Di kalangan pemilih pemula (mahasiswa)

melalui pendekatan kontekstual. Pendekatan belajar Mengajar dan Pendidikan kewarganegaraan. Metode kajian yang digunakan dalam makalah Ini adalah analisis kepustakaan. Melalui metode ini referensi konseptual, data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, novel, laporan riset, dan Dokumen literatur yang lain; kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual berpotensi sangat efektif sebagai instrument Pendidikan kewarganegaraan dalam rangka meningkatkan literasi politik pemilih pendatang baru. Dalam penelitian ini Rachman tidak diungkapkan pentingnya kesadaran dan melek politik dan kehidupan bermasyarakat.

Keberhasilan pendekatan sejak awal kepada tokoh masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Persepsi warga masyarakat terhadap program tertentu merupakan landasan utama bagi munculnya kesediaan untuk terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan setiap kegiatan program tersebut. Makna positif atau negatif sebagai hasil persepsi seseorang terhadap program akan menjadi pendorong atau penghambat baginya untuk berperan dalam kegiatannya. Partisipasi warga masyarakat dalam hal ini adalah partisipasi warga masyarakat Keboansikep Sidoarjo yang lebih mengarah kepada kesediaan mereka terlibat dalam penyeleksian DPS (Daftar Pemilih Sementara), tahapan kampanye, tahapan pemilihan serta pemantauan terhadap proses perhitungan suara. Partisipasi masyarakat banyak dipengaruhi oleh persepsi masyarakat itu sendiri terhadap pemilihan kepala daerah selama ini. Sedangkan persepsi masyarakat sebenarnya dipengaruhi oleh kekhususan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam kaitan dengan PILKADA Langsung di Kabupaten Sidoarjo, maka partisipasi aktif warga masyarakat Keboansikep Sidoarjo akan sangat ditentukan oleh persepsinya terhadap program kegiatan tersebut yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi dan budaya yang khusus. Berdasarkan hasil wawancara awal yang kelompok lakukan pada Literasi dan Edukasi Politik dalam Pilkada berlangsung di Desa Keboansikep, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya masyarakat yang tidak memberikan suaranya dalam kegiatan pemilihan calon Kepala Desa berlangsung, karena adanya warga masyarakat dari luar (pendatang baru) yang harus wajib memiliki surat domisili setempat.
2. Masih memiliki kekurangan yang terkait dengan data yang kurang validasi di Kota Sidoarjo pada pemilihan kepala desa di Desa Keboansikep
3. Jumlah biaya yang masih kurang dalam kegiatan KPPS (Kelompok penyelenggara pemungutan suara) di Desa Keboansikep.
4. Partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan faktor penghambat pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat belum maksimal terlibat dalam berpartisipasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana keadaan literasi politik masyarakat Keboansikep, serta Bagaimana peran KPU dalam konteks keadaan literasi politik masyarakat Keboansikep

KAJIAN PUSTAKA

1. Literasi Politik

Literasi politik mempunyai posisi strategis di tengah proses serta dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia dikala ini. Kampanye literasi politik wajib memiliki rancangan Aksi komunikasi terencana, supaya warga wajib mendesain, gerakan terorganisir serta dapat memegang persoalan-persoalan yang dihadapi, literasi politik ialah wajib memiliki rancangan aksi komunikasi (Bakti:33). Persepsi selalu berkaitan dengan pengalaman dan tujuan seseorang pada waktu terjadinya proses persepsi. Ia merupakan tingkah laku selektif dan bertujuan (Bigge, 1984). Ia juga merupakan proses pencapaian makna. Dengan demikian pengalaman menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan hasil persepsi. Pengalaman budaya berperan sangat penting dalam proses kognitif, karena anggapan dan pikiran yang merupakan alat utama dalam proses kognitif selalu bersumber darinya. Pengalaman seseorang yang merupakan akumulasi dari hasil berinteraksi dengan lingkungan hidupnya setiap hari dalam masyarakat, lokasi geografisnya, latar belakang ekonomi dan politiknya, keterlibatan religiusnya, sangat menentukan persepsinya terhadap suatu kegiatan. Perbedaan pengalaman ini dapat dilihat dalam PILKADA Langsung Kota Sidoarjo diikuti oleh warga masyarakat Keboansikep Sidoarjo, antara penduduk asli, pendatang, tokoh masyarakat formal dan non formal, pemuda, dan sebagainya, memiliki persepsi yang tidak sama. Perbedaan persepsi juga mempengaruhi tingkat partisipasi warga masyarakat Keboansikep Sidoarjo, sehingga ada yang berpartisipasi aktif, kurang aktif bahkan berpartisipasi semu. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (KPU Kota Sidoarjo, 2019). Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Tiap masa kampanye adalah masa pendidikan politik yang istimewa, lebih dari waktu lain. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga, pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Pendidikan politik merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Sedang menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsaan bernegara, (Berkelanjutan et al., n.d.) Sosialisasi politik merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik. Sedangkan partisipasi politik dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (Raga Manan, 2006: 47). Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Tugas dan wewenang Bawaslu adalah untuk mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh KPU, menilai dan memberikan masukan atas laporan evaluasi

pelaksanaan pemilu yang dibuat KPU, dan mengawasi setiap tahapan pemilu. Pendukung penyelenggaraan pemilu.

1. Aspek-aspek dalam Literasi Politik

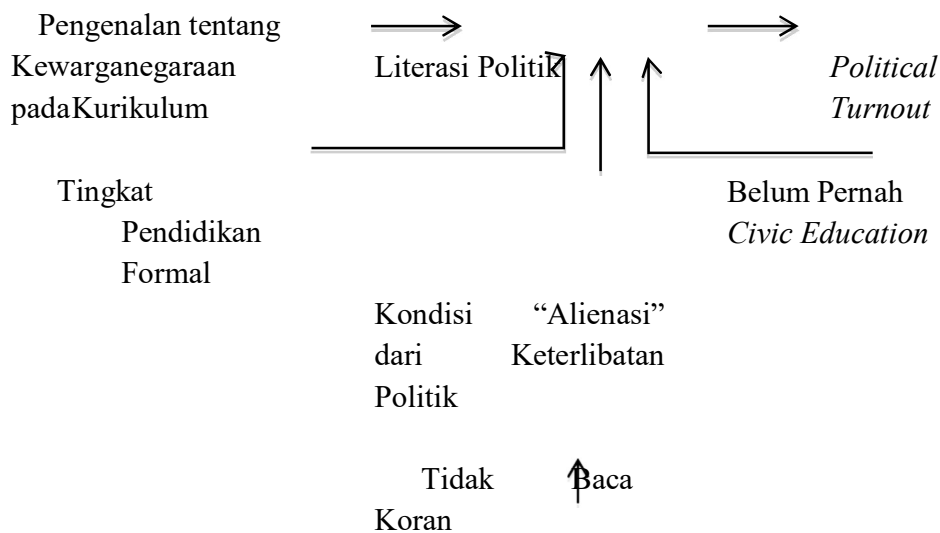
Persepsi selalu berkaitan dengan pengalaman dan tujuan seseorang pada waktu terjadinya proses persepsi. Ia merupakan tingkah laku selektif dan bertujuan (Bigge, 1984). Ia juga merupakan proses pencapaian makna. Dengan demikian pengalaman menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan hasil persepsi. Pengalaman budaya berperan sangat penting dalam proses kognitif, karena anggapan dan pikiran yang merupakan alat utama dalam proses kognitif selalu bersumber darinya. Pengalaman seseorang yang merupakan akumulasi dari hasil berinteraksi dengan lingkungan hidupnya setiap hari dalam masyarakat, lokasi geografisnya, latar belakang ekonomi dan politiknya, keterlibatan religiusnya, sangat menentukan persepsinya terhadap suatu kegiatan. Perbedaan pengalaman ini dapat dilihat dalam PILKADA Langsung Kabupaten Sidoarjo diikuti oleh warga masyarakat Keboansikep Sidoarjo, antara penduduk asli, pendatang, tokoh masyarakat formal dan non formal, pemuda, dan sebagainya, memiliki persepsi yang tidak sama. Perbedaan persepsi juga mempengaruhi tingkat partisipasi warga masyarakat Keboansikep Sidoarjo, sehingga ada yang berpartisipasi aktif, kurang aktif bahkan berpartisipasi semu. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Surabaya, 2014). Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Tiap masa kampanye adalah masa pendidikan politik yang istimewa, lebih dari waktu lain. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga, pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Pendidikan politik merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Sedang menurut (Anggra et al., 2022) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsaan bernegara, (Alfian, 1986: 235). Sosialisasi politik merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam dalam upaya meningkatkan partisipasi politik. Sedangkan partisipasi politik dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Menurut Safrudin (Syafudin et al., 2020), pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara

utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Pendidikan politik bagi warga Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Tiap masa kampanye adalah masa pendidikan politik yang istimewa, lebih dari waktu lain. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Pembentukan kepribadian politik dapat dilakukan melalui metode secara tidak langsung yaitu sosialisasi dan pelatihan, serta metode yang bersifat langsung yaitu pengajaran politik melalui institusi pendidikan. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dengan dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, terwujud dalam keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Jika hal-hal tersebut dapat terbentuk dalam jiwa setiap warga negara yang ditegakkan dengan pilar-pilar ideologi, spiritual, moral dan intelektual, maka diharapkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang berkarakter, dan dapat mengantarkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan besar (Duverger, 2005: 52).

Menurut studi literature dalam Laporan KPU Kota Sidoarjo, 2020 digambarkan bahwa model literasi dan partisipasi politik membentuk sketsa seperti bagan berikut:

Gambar 1. Sketsa Civic Education, Literasi Politik dan Political Turnout



Sumber: Laporan Penelitian KPU Kota Sidoarjo, 2020

Sedangkan pendukung utama pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. Partai politik (parpol), salah satu fungsi parpol menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia.
3. Pers, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pendidikan politik. Media sebagai sumber terbesar sarana membaca mempunyai cara tersendiri untuk memberikan pendidikan dan membentuk pemikiran masyarakat atau memberikan pembelajaran politik pada masyarakat. Misalnya dalam menyebar luaskan informasi (sosialisasi), tentang proses dan ketentuan pemilu, sistem yang akan digunakan, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Melalui peran tersebut, pers ikut aktif memberikan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik. Menurut Amal (2008), dapat dikatakan bahwa harapan terbesar bagi pendidikan politik bagi warga negara sebenarnya diharapkan dari pers. Pers juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan pemilu dalam hal melaporkan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan informasi, pers diharapkan dapat ikut memberikan pendidikan pada masyarakat untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil serta damai.
4. Lembaga Pendidikan Secara moral, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab atas persoalan- persoalan politik bangsanya, dengan membenahi etika politik bangsa. Menurut pasal 3 Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Pembinaan Kesiswaan, materi pembinaan kesiswaan meliputi demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Dunia pendidikan, harus dapat berposisi sebagai penyegaran pandangan, wawasan dan nuansa politik agar generasi muda tidak apatis terhadap persoalan politik. Diperlukan pembenahan etika politik sejak dini melalui pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan adalah bekal masa depan generasi muda. Dengan pengetahuan mendasar tersebut peserta didik tidak hanya diharapkan menjatuhkan pilihan yang benar, namun juga menjadi pelaku politik yang baik. Jika menjadi politikus nantinya, dapat menjadi politikus-politikus yang beretika. Peran perguruan tinggi dalam pendidikan politik menjadi sangat strategis karena ia dapat menjadi sebagai intermediasi sebagaimana halnya pers. Walaupun tetap saja memiliki keterbatasan karena ia juga harus bekerja menggunakan pers. Sehingga diperlukan terobosan perguruan tinggi melakukan pendidikan politik melalui pendampingan, agar masyarakat lebih kritis mensikapi kompetisi politik secara baik dan secara kuat, apalagi bagi masyarakat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka sebagai kandidat.
5. Masyarakat Pendidikan politik bagi warga negara perlu dilakukan untuk menentukan pilihan yang cerdas. Namun pendidikan politik menjadi persoalan ketika hanya dilakukan oleh lembaga formal ataupun partai politik. Seharusnya masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga melakukan pendidikan politik dengan melakukan pembelajaran

secara horizontal (horizontal learning), untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui secara cukup kandidat-kandidat yang muncul untuk dapat mewakili aspirasi mereka.

6. Metode Penelitian

Berbagai hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan digunakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Keboansikep (Desa Keboansikep) Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Kawasan Desa Keboansikep Sidoarjo dipilih dengan alasan bahwa Desa Keboansikep Sidoarjo masyarakatnya sangat beragam, dan sudah membaaur antara warga masyarakat asli dan masyarakat pendatang.

B. Strategi/ Bentuk Penelitian

Desain penelitian kualitatif - deskriptif untuk mengungkap fenomena tentang literasi politik berdasarkan dokumen hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dan KPU serta keterangan informan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Data diolah melalui proses studi dokumen dari kedua dokumen laporan hasil penelitian KPU Kabupaten Sidoarjo, laporan hasil penelitian KPU hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan mendalami fenomena temuan hasil penelitian KPU Kabupaten Sidoarjo yang dikorelasikan dengan temuan penelitian KPU dan hasil wawancara dengan informan penelitian untuk kemudian dielaborasi sebagai fenomena literasi politik masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

C. Sumber Data

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut digali dari berbagai sumber data. Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini anantara lain:

- Informan atau nara sumber, yang terdiri dari para tokoh masyarakat (formal maupun non-formal), pemuda, penduduk asli maupun pendatang yang tinggal di Desa Keboansikep.
- Tempat dan peristiwa/aktivitas pelaksanaan PILKADA Langsung di Desa Keboansikep Sidoarjo.
- Arsip dan dokumen, dalam hal ini lebih mengarah kepada dokumen resmi mengenai pelaksanaan kegiatan PILKADA Langsung Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 serta surat kabar dan majalah yang memuat berita tentang permasalahan tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

- a. Wawancara mendalam (in-depth interviewing) Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama. Pertanyaan yang diajukan bisa

semakin terfokus sehingga informasi yang dikumpulkan bisa semakin terinci dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara ini mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan persepsi dan partisipasi warga masyarakat Desa Keboansikep dalam pemilihan umum langsung PILKADA Kabupaten Sidoarjo. Teknik wawancara ini dilakukan terhadap semua informan. Masalah utama yang ditanyakan adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat(memilih), jumlah DPT (daftar Pemilih Tetap), tahapan Pemilu dan Hasil Pemilu Kabupaten Sidoarjo.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984:79). Dalam model analisis yang demikian ini terdapat empat komponen yang saling berinteraksi, yakni:

- a. Pengumpulan data,
- b. Reduksi data,
- c. sajian data,
- d. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Apabila dirasakan dari salah satu atau dua atau bahkan ketiganya masih ada sesuatu yang penting untuk dikaji, namun sumber yang tersedia terbatas, maka akan dapat dicari informasi baru sehingga sesuatu yang dianggap penting akhirnya menjadi jelas. Oleh karena itu proses ini akan berputar menjadi sebuah siklus hingga kesimpulan yang valid diperoleh.

7. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa warga masyarakat Desa Keboansikep Sidoarjo terhadap Pemilukada Langsung Kabupaten Sidoarjo Keragaman latar belakang masyarakat Desa Keboansikep dalam kenyataannya membawa pengaruh yang beragam pula dalam menanggapi permasalahan yang mereka hadapi, termasuk masalah terhadap Pemilukada Kabupaten Sidoarjo warga masyarakat Desa Keboansikep Sidoarjo. secara umum mereka bersikap aman /kondusif, baik dan setuju.

Namun ada sedikit pula yang memandang negatif atau kurang setuju dengan pemilukada terkait dengan data yang kurang validasi di Kabupaten Sidoarjo tersebut. Perbedaan ini tidak lepas dari pengalaman masyarakat selama ini, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin Sidoarjo tidak banyak memberi pengaruh kepada kehidupan masyarakat Desa Keboansikep.

Pilkada langsung memberi kebebasan kepada warga masyarakat untuk dapat memilih maupun dipilih. Pemilukada langsung merupakan kemajuan dalam berdemokrasi yang

luar biasa di Indonesia. Periode sebelumnya peristiwa pilkada langsung oleh rakyat terbilang mustahil. Kecuali hanya dilakukan ketika pemilihan kepala desa.

Partisipasi warga Desa Keboansikep Sidoarjo dalam kaitannya dengan penetapan DPT adalah membantu pelaksanaan cokolit atau verifikasi data yang dilakukan oleh Petugas Pemutakiran Data Pemilih (P2DP). Partisipasi yang diberikan antara lain memberikan informasi yang diperlukan seperti; nama ganda, usia di bawah ketentuan, pindah alamat, meninggal dunia, alamat dan kelengkapan keluarga yang memiliki hak pilih dan sebagainya.

Pilkada secara langsung sebenarnya dimulai setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menentukan bahwa “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Namun, setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPR.

Setelah terjadi perdebatan politik hingga muncul penolakan publik, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

Pilkada langsung sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Pilkada yang demokratis dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi modern di Indonesia apabila hasilnya menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat (sutrisno, 2017). Suatu Pemilu yang demokratis adalah yang memenuhi tiga prasyarat demokrasi yakni: 1) adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; 2) adanya partisipasi masyarakat, 3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik (Marijan, 2010: 83). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang harus dihadirkan dalam pemilu karena apabila partisipasi masyarakat tidak atau kurang hadir

maka pemilu yang dilaksanakan bukan Pemilu yang demokratis (Santoso, 2006: 12). Menurut Eko (2003: 307-309), Pemilu demokratis akan terwujud apabila kompetisi elite, partisipasi masyarakat maupun liberalisasi politik berupa jaminan hak-hak politik dilaksanakan secara demokratis yakni secara terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dll.

Partisipasi Pemilih untuk memilih (voting) dalam Pilkada akan mewujudkan angka partisipasi yang tinggi sebagai bagian dari tingginya tingkat partisipasi Pilkada. Tingginya angka partisipasi dalam Pilkada baik bagi penciptaan Pilkada yang demokratis sebab itu juga menunjukkan sejauh mana proses pemilu berjalan dengan adanya pelaksanaan hak kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya. Selain itu, angka partisipasi juga menunjukkan warga negara terlibat dalam kegiatan Pilkada. Hal-hal tersebut juga menandakan bahwa sistem demokrasi yang berjalan sudah dianggap baik dan tetap dipercaya oleh warga negara (Etikasari et al., 2017). Oleh karena itu, warga negara sebagai Pemilih harus berpartisipasi untuk memilih (voting) dalam Pilkada agar Pilkada yang dilaksanakan dapat mendorong penguatan sistem yang demokratis. Upaya untuk memastikan tercapainya partisipasi politik ini sudah harus dimulai ketika ada penentuan daftar pemilih tetap di tingkat desa. Warga yang sudah memenuhi kriteria sebagai Pemilih harus memastikan terdaftar sebagai Pemilih. Kemudian, pada saat hari pemilihan, warga harus meluangkan waktu untuk berpartisipasi dengan datang ke TPS untuk memilih kandidat Pilkada.

Selain itu, idealnya keterlibatan dalam Pilkada tidak sekedar dilandasi oleh faktor mobilisasi yang keterlibatannya (partisipasi) hanya disebabkan oleh bujukan atau dorongan dari luar apalagi yang berupa imbalan baik berbentuk janji atau barang. Idealnya partisipasi dalam Pilkada harus didorong oleh niat dan kesadaran penuh dari diri pribadi untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan politik yang oleh Hasbi Wahyudi (Hasbi Wahyudi et al., 2013) disebut sebagai partisipasi otonom. Selain itu, perilaku memilih warga negara dalam Pilkada juga jangan sampai dilakukan atas pertimbangan pragmatisme politik yakni sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan praktis tertentu misalnya atas pertimbangan iming-iming mendapat imbalan materi. Perilaku memilih dalam Pilkada seyogianya dilandasi pertimbangan atas tujuan-tujuan tertentu yang bersifat ideologis. Perilaku memilih dalam Pilkada haruslah ditujukan untuk menghadirkan Kepala Daerah yang mau dan mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat selama kepemimpinannya kelak.

8. Kesimpulan Dan Saran

A. Simpulan

Keragaman latar belakang masyarakat Keboansikep Sidoarjo baik sosial, ekonomi maupun budaya membawa pengaruh yang beragam dalam menanggapi permasalahan yang mereka hadapi, termasuk masalah persepsi dan partisipasi mereka dalam PILKADA Langsung Kabupaten Sidoarjo. Persepsi dan partisipasi warga masyarakat Keboansikep dalam PILKADA Langsung Kabupaten Sidoarjo secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut: persepsi positif/setuju dengan dalam PILKADA Langsung kota Sidoarjo, maka partisipasi mereka cukup tinggi. Mereka yang memiliki persepsi dan partisipasi positif, rata-rata berlatar belakang sosial ekonomi mapan.

Pilkada secara langsung sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu yang harus ada dalam Pilkada yang demokratis adalah partisipasi warga negara. Namun, seolah “jauh panggang dari api”, kualitas partisipasi politik Pemilih dalam Pilkada. Idealnya, Partisipasi warga dalam Pilkada tidak hanya didorong oleh faktor mobilisasi namun yang lebih utama harus didorong oleh niat dan kesadaran penuh dari diri pribadi untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan politik dalam Pilkada. Selain itu, perilaku memilih warga negara dalam Pilkada juga jangan sampai menolak politik uang melalui pembuatan kesepakatan bersama keluarga maupun masyarakat desa dan kalau perlu ditindaklanjuti dengan pemasangan spanduk/ banner menolak politik uang.

B. Saran

Secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sudah berjalan lancar. Namun demikian, agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah periode berikutnya dan pelaksanaan pemilu lainnya dapat berjalan lancar, sukses, dan aman serta dapat ditingkatkan kualitasnya.

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang diperlukan dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif warga masyarakat dalam PILKADA Langsung Kabupaten Sidoarjo periode berikutnya.
2. hasil penelitian ini merupakan masukan yang penting untuk memperluas pandangan dalam perencanaan program sehingga dapat disusun rancangan kegiatan yang lebih tepat dan sesuai dengan latar belakang social ekonomi dan budaya warga masyarakat.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan terutama memberi wawasan masukan yang berguna bagi penyusunan strategi pengembangan partisipasi masyarakat yang lebih tepat dalam rangka pengembangan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggra, B. N., Pendidikan, M., Dan, P., & Sosial, F. I. (2022). *Kinship Politics in the Implementation of Tanjung Pauh Mudik Village Government*. 11(3), 1230–1241. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7214>
- Astuti, S. I. (2019). *Enhancing Active Citizenship and Political Literacy among Young Voters in High School*. 307(SoRes 2018), 309–313. <https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.72>
- Ayu Mawarti, R., Mujtaba Habibi, M., Zusron Alfaqi, M., & Aris Shofa, A. M. (2022). Strategy for Building Political Literacy Through Peace Education in Society. *KnE Social Sciences*, 2022, 603–614. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i14.12014>
- Berkelanjutan, M. P., Zahara, A., Farida, R., Muzaffarsyah, T., Kuntorini, D., Angreni, D., Razi, A., Abrar, M., Irwansyah, D., Azmi, N., Linasari, D., Tinggi, S., Administrasi, I., & Malikussaleh, U. (n.d.). 1,2,4, . 12–22.
- Etikasari, R., Muharyanti, R., & Wiguna, A. (2017). E Valuasi P Igmnen K Arotenoid K Arang L Unak S Arcophyton S P . In *Indonesia Jurnal Farmasi* (Vol. 2, Issue 1).
- Hasbi Wahyudi, Tantio Fernando, Azhari Ahmad, Ayu Khairani, Fatimah, Ivan Muhammad Agung, & Mirra Noor Milla. (2013). Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(Desember), 94–99.
- Ibeawuchi, D., Onyeasua, J. N. K. E., Chineze, R., & Azuka, M. (2022). *Essence Of Inculcating Political Literacy Education In Nigerian Citizens*. 19(4), 521–531.
- Rachman, M., Feber, W., & Christover, D. (2022). Improving the Political Literature of Beginner Voter Through Contextual Learning Approach and Citizenship Education. *Journal of Positive School Psychology*, 6(6), 217–223. <http://journalppw.com>
- Rafni, A., & Suryanef, S. (2017). Roles of Democratic Volunteers in Developing Political Literacy. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 33(1), 74. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2069>
- Ramaputra, M. A., & Afifi, S. (2021). Analisis Strategi Kreatif Konten Promosi Usaha Foodies Melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 5(2), 16–35.
- Surabaya, U. A. (2014). *Noor Ifah ABSTRAK*. 1–16.
- sutrisno, cucu. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 36–48. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>
- Syafrudin, A., Pascasarjana, S., & Ibnu, U. (2020). *M E T O D E P E M B E L A J A R A N R E F O R M A S I S O S I A L*. I(I), 176–189.